

Optimalisasi Pengembangan Desa Tanah Abang Selatan Berbasis Potensi Lokasi untuk Mendorong Kemandirian dan Keberlanjutan Pembangunan Wilayah

Herda Sabriyah Dara Kospa^{1)*}, Sumi Amariena Hamim²⁾, Hala Haidir³⁾, Endy Agustian⁴⁾,
Yogie Ardiwinata⁵⁾, Zenal Mutaqin⁶⁾

^{1),2),3),4),5),6)}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Indo Global Mandiri

Jl. Jend. Sudirman Km.4 No. 629, 20 Ilir, Kec. Ilir Timur. I, Palembang, Sumatera Selatan 30129

*Email Penulis Koresponden: darakospa@uigm.ac.id

Received: 03/10/25; Revised: 23/10/25; Accepted: 10/12/25

Abstrak

Pembangunan desa yang berkelanjutan memerlukan dukungan data spasial dan demografis yang akurat sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Desa Tanah Abang Selatan menghadapi kendala serius karena belum memiliki peta administratif yang sah dan profil desa yang terintegrasi secara komprehensif. Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya perencanaan berbasis data, keterbatasan akses terhadap program pembangunan lintas sektor, serta meningkatnya risiko konflik batas wilayah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Program Kemitraan Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan peta administratif serta profil desa sebagai instrumen utama dalam mendukung kemandirian dan keberlanjutan pembangunan wilayah. Tahapan pelaksanaan PkM meliputi persiapan dan sosialisasi, survei penetapan batas administratif, pengumpulan data untuk profil desa, Focus Group Discussion (FGD) dan validasi partisipatif, integrasi data hasil survei, serta validasi lapangan dan penyerahan produk akhir. Pendekatan partisipatif diterapkan pada setiap tahap dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat sebagai mitra aktif. Kegiatan ini menghasilkan 2 (dua) luaran utama: peta administratif desa dengan batas wilayah yang terverifikasi serta dokumen profil desa yang mencakup data kependudukan, potensi ekonomi, aspek sosial budaya, sarana prasarana, dan kondisi lingkungan. Luaran tersebut memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam merumuskan perencanaan berbasis bukti dan meningkatkan legitimasi tata kelola ruang. Dengan demikian, PkM ini berhasil menutup kesenjangan data spasial dan sosial desa, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta memberikan pijakan kuat bagi pengembangan potensi lokal. Ke depan, diperlukan penguatan sistem informasi digital desa agar pemutakhiran data dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan berkesinambungan.

Kata kunci: PkM, Profil Desa, Peta Administratif, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

Sustainable rural development requires accurate spatial and demographic data as a foundation for planning, implementation, and policy evaluation. Tanah Abang Selatan Village faces a significant challenge due to the absence of a verified administrative map and a comprehensive village profile. This situation weakens evidence-based planning, limits access to government development programs, and increases the risk of boundary conflicts with neighboring villages. To address these issues, this Community Partnership Program (PkM) was implemented with the primary objective of producing an administrative map and a village profile as strategic tools to strengthen local autonomy and ensure sustainable development. The implementation stages consisted of preparation

and socialization, boundary survey and mapping, data collection for the village profile, Focus Group Discussions (FGDs) and participatory validation, data integration, followed by field validation and the handover of final outputs. A participatory approach was applied throughout the process, engaging local government officials and community members as active partners. The program resulted in two main outputs: an administrative map with clearly verified boundaries, and a comprehensive village profile covering population data, economic potential, socio-cultural aspects, infrastructure, and environmental conditions. These outputs enhance the capacity of the village government to design evidence-based development plans and strengthen the legitimacy of spatial governance. In conclusion, this PKM successfully closed the data gaps in spatial and socio-economic information, increased community participation, and provided a strong foundation for optimizing local potential. Future efforts should focus on integrating digital village information systems to ensure faster, more transparent, and sustainable data updates.

Keywords: *Community Service, Village Profile, Administrative Map, Participation, Sustainable Development*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan yang efektif dan berkelanjutan menuntut basis data spasial dan demografis yang akurat sebagai prasyarat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Program-program nasional menunjukkan bahwa peningkatan literasi statistik dan ketersediaan data desa dapat meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun program yang tepat sasaran serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal (Badan Pusat Statistik, 2022). Di sisi tata kelola informasi, sistem informasi profil desa yang terintegrasi berperan penting dalam mendokumentasikan kondisi kependudukan, sarana prasarana, potensi ekonomi, serta isu sosial kultural. Namun demikian, kelemahan dalam kualitas dan sinkronisasi data terbukti menghambat penyusunan rencana pembangunan desa yang responsif dan berbasis bukti (Salman & Yayan, 2024).

Salah satu aspek mendasar yang belum optimal dalam tata kelola desa adalah penentuan batas administratif yang jelas dan terverifikasi. Penegasan batas wilayah desa melalui pembuatan peta yang akurat menjadi langkah strategis untuk mencegah potensi sengketa lahan, mempertegas kewenangan pengelolaan ruang, sekaligus membuka peluang bagi desa dalam mengakses program sertifikasi tanah secara resmi. Untuk menghasilkan peta yang sahih dan dapat dijadikan dasar hukum perencanaan, diperlukan pendekatan komprehensif melalui pemanfaatan citra satelit atau foto udara, survei lapangan, serta integrasi data dari berbagai instansi agar informasi yang dihasilkan valid dan komprehensif (Suardita & Adrie, 2023).

Di luar aspek teknis spasial, penguatan pembangunan ekonomi desa juga menuntut tersedianya data potensi wilayah yang mutakhir. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat bergantung pada informasi yang akurat mengenai potensi sumber daya lokal. Data yang valid memungkinkan perencanaan pembangunan ekonomi desa lebih terarah pada komoditas unggulan serta layanan bernilai tambah tinggi, sehingga mendorong terbentuknya rantai nilai berkelanjutan sebagai fondasi kemandirian desa (Ultari & Khoirunurrofik, 2024).

Praktik Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terkait penyusunan profil desa dan pemetaan administratif telah banyak dilakukan di berbagai daerah. Misalnya, penyusunan profil desa di Desa Sungsang I Kabupaten Banyuasin II (Haidir et al., 2023), Desa Tanon (Astuti et al., 2020), dan Desa Cintaratu yang menekankan aspek demografi pekerjaan, pendapatan, serta sumber penghidupan (Fordian et al., 2020). Selain itu, pengembangan profil desa berbasis web juga telah dilakukan, seperti yang dicontohkan oleh (Yuningsih & Saefulrahman, 2020) serta (Sagala et al., 2022). Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan-kegiatan terdahulu, pendampingan penyusunan profil desa terbukti mampu meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat sekaligus mempercepat proses pemutakhiran data baik secara luring maupun daring. Temuan

empiris juga menunjukkan bahwa integrasi data spasial melalui pemetaan partisipatif dapat meningkatkan legitimasi batas wilayah serta mendorong tata kelola ruang yang lebih inklusif (Akbar et al., 2021).

Lebih lanjut, penelitian terkini menegaskan bahwa profil desa yang terintegrasi merupakan landasan penting dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*), sekaligus mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Kospa & Haidir, 2024). Tanpa adanya data yang lengkap dan terkini, pembangunan rentan terhadap kesalahan sasaran serta rendahnya efektivitas program (Hayati et al., 2025). Dalam konteks penyusunan profil, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan keakuratan data sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap program pembangunan (Handayani et al., 2023).

Keterbatasan data desa yang tidak lengkap, tidak mutakhir, serta belum jelasnya batas administratif, menyebabkan Desa Tanah Abang Selatan menghadapi berbagai hambatan dalam memanfaatkan potensi wilayah, menyusun program kemandirian ekonomi, serta menjaga keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, pelaksanaan PkM dengan fokus pada survei partisipatif guna menghasilkan peta administratif yang terverifikasi dan penyusunan profil desa yang komprehensif menjadi langkah mendesak. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa memperkuat dasar tata kelola wilayah, meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan berbasis data, serta mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi dan keberlanjutan pembangunan desa.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

2.1 Tahapan Kegiatan pengabdian

Metode pelaksanaan pengabdian menguraikan tentang tahapan pelaksanaan pengabdian dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat. Adapun tahapan kegiatan PkM ini terdiri dari 5 (lima) tahapan dimulai dari menganalisis permasalahan mitra, membuat kesepakatan kerjasama, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi akhir kegiatan. Tahapan pelaksanaan kegiatan PkM penyusunan profil Desa Tanah Abang ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

2.2 Analisa dan Solusi Permasalahan Mitra

Tahap awal dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan perangkat desa, serta kajian dokumen terkait untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi Desa Tanah Abang Selatan. Permasalahan prioritas yang ditemukan adalah belum adanya peta administratif desa yang akurat serta belum tersusunnya profil desa yang komprehensif.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dirumuskan solusi berupa penyusunan peta administratif desa melalui survei batas wilayah dan pembuatan profil desa berbasis data aktual melalui survei dan *Focus Group Discussion* (FGD).

2.3 Kesepakatan dengan mitra

Setelah solusi dirumuskan, dilakukan pertemuan formal dengan mitra, yaitu Kepala Desa Tanah Abang Selatan, Bapak Ahmad Sartono CM beserta perangkat desa, untuk menyepakati bentuk kegiatan PkM, peran masing-masing pihak, serta luaran yang akan dihasilkan. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk notulen kesepakatan sehingga kedua belah pihak memiliki komitmen yang sama terhadap keberhasilan program.

2.4 Persiapan Kegiatan PkM

Tahap persiapan meliputi penyusunan instrumen pengumpulan data (kuesioner survei, panduan wawancara, format FGD), penyiapan perangkat teknologi (GPS, perangkat pemetaan, *software* GIS), serta penyusunan tim pelaksana. Selain itu, dilakukan sosialisasi awal kepada masyarakat desa mengenai tujuan kegiatan untuk membangun pemahaman dan dukungan partisipasi.

2.5 Persiapan Kegiatan PkM

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa langkah operasional, yaitu:

- 1) Survei Lapangan untuk Pemetaan Administratif: Penentuan titik koordinat batas desa menggunakan GPS, pemetaan digital menggunakan perangkat GIS, serta verifikasi lapangan bersama perangkat desa.
- 2) Pembuatan Profil Desa: Pengumpulan data kependudukan, social ekonomi, sarana prasarana, potensi sumber daya alam, dan kondisi lingkungan melalui survei primer dan sekunder.
- 3) *Focus Group Discussion* (FGD): Diskusi partisipatif dengan masyarakat dan perangkat desa untuk menggali permasalahan, potensi, serta aspirasi pembangunan.
- 4) Penyusunan Dokumen: Integrasi hasil survei dan FGD untuk menghasilkan peta administratif dan profil desa yang komprehensif serta dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan desa.

2.6 Evaluasi hasil kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk menilai ketercapaian luaran PkM, baik dari aspek kualitas peta administratif maupun kelengkapan profil desa. Evaluasi dilakukan secara partisipatif bersama mitra dengan menggunakan indikator keterlibatan masyarakat, keakuratan data, serta kebermanfaatan dokumen yang dihasilkan bagi perencanaan pembangunan desa. Hasil evaluasi kemudian dijadikan masukan untuk tindak lanjut dan pengembangan kegiatan pengabdian di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program PkM di Desa Tanah Abang Selatan ini telah berhasil dilakukan sesuai perencanaan oleh tim dosen dan tim mahasiswa perencanaan Wilayah dan Kota Universitas IGM. Hasil kegiatan pengabdian ini diuraikan secara detail sebagai berikut.

3.1. Tahap Persiapan dan Sosialisasi

Tahap persiapan dimulai dengan koordinasi internal tim PkM serta penyusunan instrumen kegiatan, termasuk kuesioner untuk survei profil desa, format peta kerja, serta jadwal pelaksanaan. Selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada Pemerintah Desa Tanah Abang Selatan yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa, serta tokoh Masyarakat seperti yang terlihat

pada Gambar 2. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi kegiatan, ruang lingkup, metode pelaksanaan, serta bentuk luaran yang dihasilkan.

Kegiatan sosialisasi berperan penting dalam membangun komitmen bersama serta meningkatkan partisipasi warga. keterlibatan masyarakat sejak tahap awal perencanaan pembangunan desa meningkatkan rasa memiliki terhadap program serta memperkuat legitimasi hasil (Akbar et al., 2021). Pada tahap ini, diperoleh kesepakatan jadwal kegiatan, identifikasi awal masalah, serta penunjukan kader desa yang mendampingi proses survei dan pemetaan.



Gambar 2. Sosialisasi kegiatan PkM bersama pemerintah desa

3.2. Survei Pemetaan Batas Administratif

Tahap berikutnya adalah survei lapangan untuk penentuan batas wilayah administratif desa. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan perangkat desa, masyarakat perbatasan, serta koordinasi dengan desa tetangga. Metode yang digunakan berupa kombinasi pemetaan berbasis GPS, interpretasi citra satelit, serta verifikasi lapangan. Foto kegiatan survei lapangan dan diskusi bersama dengan perangkat desa dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Proses survei lapangan pemetaan batas wilayah Desa Tanah Abang Selatan

3.3. Survei Penyusunan Profil Desa

Survei penyusunan profil desa dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara rumah tangga sampel, observasi fasilitas umum, serta pendataan kegiatan ekonomi Masyarakat seperti yang terdokumentasi pada Gambar 4. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen pemerintah desa, BPS, dan dinas terkait. Instrumen survei meliputi aspek demografi (jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan), ekonomi (mata pencaharian utama, UMKM, BUMDes), sosial budaya (lembaga masyarakat, adat

istiadat), sarana prasarana (jalan, listrik, air bersih), serta lingkungan (kondisi lahan, sumber daya alam). Profil desa yang komprehensif ini menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta pengajuan program ke tingkat kabupaten. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa data profil desa yang terintegrasi mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (Kospa & Haidir, 2024) serta meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan (Hayati et al., 2025).



Gambar 4. Proses survei rumah tangga untuk penyusunan profil desa

3.4. FGD dan Validasi Partisipatif

Setelah survei, dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan perangkat desa dan perwakilan Masyarakat yang terlihat pada Gambar 5. FGD berfungsi untuk memvalidasi data hasil survei sekaligus mengidentifikasi permasalahan prioritas dan potensi unggulan desa. Keterlibatan masyarakat dalam validasi data memberikan ruang bagi warga untuk memastikan informasi yang dihasilkan merepresentasikan kondisi faktual. (Handayani et al., 2023) menekankan bahwa proses partisipatif ini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap dokumen pembangunan desa. Pada FGD di Desa Tanah Abang Selatan, masyarakat menekankan pentingnya pengembangan sektor pertanian dan perikanan sebagai komoditas unggulan, serta perbaikan sarana jalan dan akses air bersih sebagai prioritas pembangunan infrastruktur.



Gambar 5. Pelaksanaan FGD validasi partisipatif bersama perangkat desa

3.5. Integrasi Data dan Penyusunan Produk Akhir

Data hasil survei dan FGD kemudian diintegrasikan menjadi dokumen profil desa dan peta administratif resmi. Proses integrasi dilakukan melalui verifikasi silang antara data primer, sekunder, dan masukan Masyarakat seperti pada Gambar 6. Produk akhir berupa:

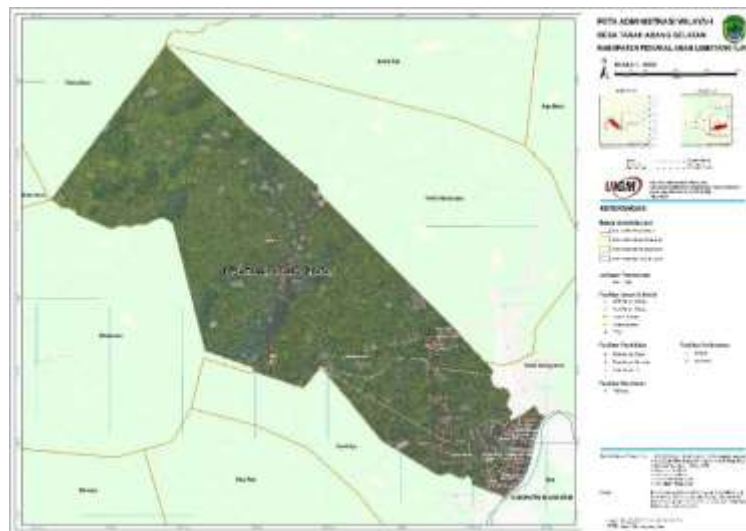
- 1) Profil Desa Tanah Abang Selatan berisi data demografi, sosial budaya, ekonomi, sarana prasarana, serta kondisi lingkungan.
- 2) Peta Administratif Desa dengan delineasi batas yang sah dan telah disepakati (Gambar 7).

Menurut (Fordian et al., 2020), profil desa yang disusun secara sistematis dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Sementara itu,

integrasi data spasial berbasis GIS menjadi instrumen utama dalam pengelolaan ruang yang inklusif (Akbar et al., 2021)



Gambar 6. Penyusunan dokumen profil desa di kantor desa



Gambar 7. Produk akhir peta administratif Desa Tanah Abang Selatan

3.5. Validasi Lapangan dan Penyerahan Luaran

Tahap akhir kegiatan adalah validasi lapangan terhadap peta administratif dan dokumen profil desa, yang dilakukan bersama perangkat desa dan perwakilan masyarakat. Validasi lapangan penting untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi faktual serta menghindari kesalahan teknis maupun administratif (Yuningsih & Saefulrahman, 2020). Setelah validasi, luaran berupa profil desa dan peta administratif resmi diserahkan kepada Pemerintah Desa Tanah Abang Selatan (Gambar 8). Produk ini menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes serta pengajuan program ke kabupaten. Sebagaimana dinyatakan (Sagala et al., 2022), penyediaan data desa yang terintegrasi dapat mempercepat proses perencanaan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.



Gambar 8. Penyerahan dokumen profil desa dan peta administratif kepada Kepala Desa Tanah Abang Selatan

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PkM) di Desa Tanah Abang Selatan berhasil menghasilkan 2 (dua) luaran utama, yaitu peta administratif desa dengan batas wilayah yang terverifikasi serta dokumen profil desa yang komprehensif dan mutakhir. Kedua produk ini disusun melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga secara aktif melalui survei, *Focus Group Discussion* (FGD), serta validasi lapangan. Penyusunan peta administratif terbukti penting untuk memperjelas batas kewenangan wilayah, mencegah potensi konflik antar desa, serta memperkuat dasar hukum dalam pengelolaan tata ruang dan aset desa. Sementara itu, profil desa yang terintegrasi memberikan landasan data yang akurat bagi penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis bukti, terutama dalam sektor sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Kegiatan PkM ini tidak hanya menghasilkan dokumen formal, tetapi juga meningkatkan kapasitas perangkat desa dan masyarakat dalam memahami pentingnya data spasial dan demografis sebagai instrumen perencanaan pembangunan. Proses partisipatif yang dilakukan turut mendorong rasa memiliki masyarakat terhadap hasil yang diperoleh, sehingga memperbesar peluang keberlanjutan pemanfaatan luaran dalam perencanaan desa. Dengan adanya peta administratif dan profil desa, Desa Tanah Abang Selatan kini memiliki landasan yang lebih kuat untuk mengoptimalkan potensi lokal, mendorong kemandirian ekonomi, serta memastikan keberlanjutan pembangunan wilayah. Ke depan, keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat direplikasi di desa lain dengan kondisi serupa, serta diperkuat melalui pengembangan sistem informasi desa berbasis digital agar pemutakhiran data dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tim PkM ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan KKN Tematik antara Universitas IGM dan Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, khususnya perangkat Desa Tanah Abang Selatan dan masyarakatnya yang menerima baik program PkM ini, serta LPPMK UIGM dan tim editor Jurnal Abdimas yang membantu terbitnya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & van Maarseveen, M. F. A. M. (2021). The Role of Participatory Village Maps in Strengthening Public Participation Practice. In *ISPRS International Journal of Geo-Information* (Vol. 10, Issue 8). <https://doi.org/10.3390/ijgi10080512>
- Astuti, K. D., Pangi, Yesiana, R., Harjanti, I. M., Anggraini, P., & Septiarani, B. (2020). Pprofil Desa Sebagai Dasar Perencanaan dan Pembangunan Desa Tanon. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 01(04), 215–225.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Ayo kita sukseskan Desa Cinta Statistik — Cinta Statistik*. https://tegalkab.bps.go.id/en/news/2022/06/09/200/ayokita-sukseskan-desacantik--cinta-statistik.html?utm_source=chatgpt.com
- Fordian, D., Dai, R. R. M., & Sitio, N. M. (2020). Preparation of cintaratu village profile based on work demography, income and living sources. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 6–9.
- Haidir, H., Natul, A. S., Kospa, H. S. D., & Anggara, A. (2023). Pembuatan Profil Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(4), 1931–1938. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i4.3475>
- Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*, 3, 100089. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>
- Hayati, F. N., Hidayah, F. N., Pradipta, F. A., Janitra, F. D., Khairy, R. Al, & Rayhan, R. F. (2025). Sosialisasi dan Implementasi Teknologi dalam Peningkatan Manajemen Data Masyarakat. *Jurnal Masyarakat Madani*, 9(2), 2376–2385. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v9i2.29731>
- Kospa, H. S. D., & Haidir, H. (2024). Penyusunan Profil Desa dalam Mendukung Kemandirian Desa Lubuk Enau Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 8(3), 263–273. <https://doi.org/10.36982/jam.v8i3.4708>
- Sagala, J. R., Hasugian, P. S., & Sulindawaty. (2022). Penerapan Sistem Informasi Profil Desa Berbasis WebDi Desa Situnggaling. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 2(2), 91–96.
- Salman, A., & Yayan, N. (2024). Evaluasi Sistem Informasi Profil Desa Dan Kelurahan (Prodeskel) Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Gunungmanik, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang Tahun 2022. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 4(2), 427–441.
- Suardita, I. K., & Adrie. (2023). Urgensi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa. *Jurnal Yustitia*, 17(2), 19–27. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i2.1122>
- Ultari, T., & Khoirunurrofik. (2024). The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Village Development: Empirical Evidence from Villages in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 8(2), 256–280. <https://doi.org/10.36574/jpp.v8i2.559>
- Yuningsih, N. Y., & Saefulrahman, I. (2020). Pemutakhiran Data Profil Dan Potensi Desa Berbasis Data Dasar Keluarga. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.33061/awpm.v4i1.3321>